



Judul : Anggaran KLH cuma Rp 1,2 T, DPR soroti prioritas pengelolaan sampah
Tanggal : Selasa, 22 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anggaran KLH Cuma Rp 1,2 T DPR Soroti Prioritas Pengelolaan Sampah

ANGGOTA Komisi XII DPR Meitri Citra Wardani menyoroti pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,232 triliun. Angka itu tercatat mengalami penurunan sekitar 11,75 persen jika dibandingkan dengan alokasi belanja KLH/BPLH pada 2026.

Padahal, lanjutnya, pengelolaan sampah merupakan salah satu program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KLH/BPLH, pengelolaan sampah ditempatkan sebagai bagian prioritas pembangunan, termasuk program pengolahan sampah jadi energi listrik serta Gerakan Gentengisasi, Pengendalian Sampah, dan Penghijauan.

Meitri menyayangkan penurunan ruang fiskal KLH/BPLH, terlebih di tengah persoalan sampah yang makin kompleks. Apalagi, pengelolaan sampah bukan masalah yang bisa diselesaikan di sektor hilir saja. "Penanganan komprehensif wajib dibenahi dari sektor hulu secara konsisten agar beban lingkungan tidak terus membengkak," ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Dalam pagu yang disepakati, Program Kualitas Lingkungan Hidup memperoleh Rp 314,08 miliar dari total pagu Rp 1,232 triliun. Sebelumnya KLH/BPLH mengusulkan tambahan Rp 1,339 triliun agar pagu yang diharapkan jadi Rp 2,572 triliun. Namun pembahasan akhir di Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran hanya Rp 1,232 triliun.

Meitri meminta keterbatasan anggaran itu disikapi dengan memastikan program pengelolaan sampah benar-benar menyentuh persoalan mendasar masyarakat. Pendekatan pengelolaan sampah tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan limbah yang sudah menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa solusi komprehensif sejak dari pemukiman warga.

Penyelesaian sampah sebaiknya tidak dilakukan hanya setelah timbul masalah di lingkungan. Sektor hulu wajib diperkuat melalui pemilahan dari sumber, pengolahan tingkat rumah tangga, penguatan bank sampah, serta pengurangan sampah oleh produsen. "Tanpa pembenahan hulu, beban TPA dipastikan bakal terus meningkat secara signifikan," tegasnya.

Berikutnya, dalam rancangan anggaran 2027, KLH/BPLH telah mengalokasikan dana Rp 20 miliar untuk kegiatan berbasis masyarakat. Alokasi anggaran itu terdiri atas Rp 13,25 miliar untuk penyediaan peralatan pendukung pengolahan sampah, serta Rp 6,75 miliar dialokasikan khusus bagi kegiatan edukasi dan penyebaran informasi pengelolaan sampah.

Menurutnya, pendekatan itu menginginkan warga ditempatkan sebagai bagian utama sistem pengelolaan sampah, bukan sekadar penerima program belaka. Selain itu, masyarakat membutuhkan ekosistem lengkap seperti fasilitas pemilahan, komposter, bank sampah, sistem pengangkutan terintegrasi, insentif ekonomi, serta kepastian pengolahan sampah yang telah dipilah. ■ PVB